

Defisit APBN dan Utang Luar Negeri

MEMASUKI bulan ketiga 2016, kita dihadapkan pada perkembangan ekonomi makro khususnya capaian dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menggembirakan namun juga menggelisahkan. Keberhasilan pemerintah dalam menggenjot dan meningkatkan penyerapan belanja telah mampu memberikan hasil yang cukup menggembirakan. Pembangunan berbagai sarana infrastruktur sudah mulai bisa dirasakan.

Realisasi belanja negara tahun 2015 sebesar Rp 1.796,6 triliun atau tumbuh 1,09 persen ketimbang realisasi 2014 senilai Rp 1.777,2 triliun. Anggaran belanja tidak saja membesar, tetapi laju penyerapannya juga semakin cepat. Hal ini tentu saja mengindikasikan semakin membaiknya pengelolaan belanja negara.

Sementara keprihatinan justru berasal dari sisi pendapatan negara yang cenderung memiliki tren negatif. Realisasi pendapatan tahun 2015 sebesar Rp 1.504,5 triliun atau tumbuh negatif 2,97% dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 senilai Rp 1.550,5 triliun. Hal ini berimplikasi pada semakin membesarnya defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dari target Rp 222,5 triliun atau 1,9% terhadap PDB, realisasinya kian membesar menjadi Rp 292,1 triliun atau 2,56% terhadap PDB.

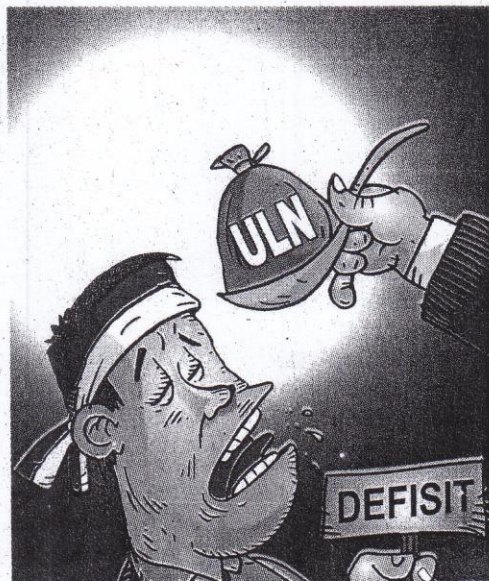
Gejala pergerakan belanja dan pendapatan negara yang berlawanan ini ternyata merembet sampai awal tahun 2016. Selama periode 1 Januari - 5 Februari 2016 pendapatan negara tercatat Rp 94,9 triliun (tumbuh negatif 8,13 persen) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara realisasi belanja telah mencapai Rp 164,9 triliun (tumbuh positif 27,73%) pada periode yang sama tahun lalu yaitu Rp 129,1 triliun. Indikasi kesenjangan fiskal ini sebenarnya sudah dirasakan sejak dua tahun terakhir. Pada tahun 2015 penerimaan dari sektor migas susut menjadi tinggal 10% saja dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 20%. Demikian juga pada penerimaan Pajak Penghasilan migas dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sumber daya alam (SDA) menurun 46,71% dari Rp 328,3

Indra Darmawan

triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 153,35 triliun pada tahun 2015.

Strategi Kreatif

Perkembangan belanja negara semacam ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Sejalan dengan Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo yang diaktualisasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka



KR-JOKO SANTOSO

Menengah Nasional 2015-2019, telah ditargetkan bahwa akan dibangun infrastruktur senilai Rp 6.541 triliun. Dari kebutuhan tersebut, APBN dan APBD direncanakan memberi kontribusi Rp 1.555 triliun (24%).

Ada beberapa hal yang mesti menjadi perhatian pemerintah dalam upaya memperkecil defisit APBN dan pembiayaan infrastruktur. *Pertama*, desain program pembangunan. Saatnya pemerintah untuk mendesain program pembangunan yang sungguh bermanfaat bagi rakyat, bukan sebagai ajang perburuan rente sekelompok orang saja.

Kedua, perlu dikaji mengenai sumber-sumber

"KEDAULATAN RAKYAT"

JUMAT KLIWON, 11 MARET 2016
(1 JUMADILAKIR 1949)

pembiayaan baru yang lebih menjamin keberlanjutan fiskal. Pemerintah tidak lagi bisa mengandalkan cara-cara konvensional dalam pemenuhan kebutuhan belanja negara khususnya pembangunan infrastruktur.

Utang luar negeri (ULN) selama ini menjadi andalan pemerintah dalam pembiayaan menutup defisit APBN. Namun saat ini tampaknya jika langkah ini yang ditempuh justru akan membuat Indonesia akan kembali masuk dalam *debt trap*. Saat ini ULN Indonesia per-akhir 2015 telah mencapai 310,722 miliar dolar AS atau sekitar Rp 4.200 triliun. Nilai ULN pada tahun 2015 tumbuh 5,8% dan pemerintah memberikan sumbangan yang signifikan karena pertumbuhan utangnya mencapai 11,26% dalam setahun menjadi 137,746 miliar dolar AS.

Di tengah tekanan ekonom dunia yang belum sepenuhnya membaik dan kinerja ekspor yang masih fluktuatif, pertumbuhan ULN ini tentu saja membuat sejumlah rasio menjadi meningkat. Rasio utang terhadap PDB meningkat dari 34,83% menjadi 36,06%. Rasio pembayaran utang juga meningkat dari 57% menjadi 61,68%. Kenaikan rasio ini bermakna menurunnya kemampuan Indonesia dalam membayar utang.

Akhirnya, dengan situasi yang demikian, pemerintah mau tidak mau harus mencari alternatif kreatif dalam menyelamatkan Nawacita. Perubahan struktur dan strategi kreatif perlu dicari untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa menambah beban rakyat. □ - k

**) Indra Darmawan SE MSi,
Dosen Prodi Pendidikan Ekonomi
Universitas Sanata Dharma,
Mahasiswa S3 Pendidikan Ekonomi
Universitas Negeri Malang.*